Isu Kebijakan Teknologi Informasi Pada Perguruan Tinggi

Tole Sutikno
Program Studi Teknik Elektro, Universitas Ahmad Dahlan
Kampus III, Jln. Prof. Dr. Soepomo, Janturan, Yogyakarta
e-mail: tole@ee.uad.ac.id

Abstract

Policies and policy development of information technology have assumed an increasingly central role in higher education. The larger the institution is, the more likely it is to support a comprehensive library of policies. Unfortunately, it is not one-size-fits-all policy or policy development process, exist. Nevertheless, the policy should be always retained to strive to embody the traditions, culture, and personality of an institution. Therefore, recognizing the distinctions between the existing policies and the areas in which there is a need for new information technology specific policy development is very important.

Keywords: *higher education, information technology, policy development*

Pendahuluan

Kebijakan dan pengembangan kebijakan memainkan peran penting pada pendidikan tinggi. Hal ini setidaknya dikarenakan oleh tiga alasan mendasar berikut: (1) kebijakan sering berkaitan dengan kewajiban hukum; (2) struktur kompleks administrasi akademik memerlukan manual operasi yang eksplisit; dan (3) adanya keanekaragaman dan kompleksitas yang berhubungan dengan kepentingan institusi akademik, pemerintah dan kebutuhan pasar. Karenanya, ketiga hal tersebut merupakan problem bersama bagi setiap universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik dan akademi untuk menciptakan kebijakan yang mendukung lingkungan yang sehat dan regulasi yang aman terkait budget dan finansial, sumber daya manusia, peraturan perundang-undangan dan kebijakan teknologi informasi (McClure, 1998).

Semakin besar suatu institusi, semakin besar kemungkinan untuk mendukung kebijakan yang komprehensif. Namun penting untuk dicatat bahwa tak ada satupun ukuran kesesuaikan semua kebijakan. Kebijakan dan proses pengembangan kebijakan seharusnya selalu berusaha untuk mewujudkan tradisi, kultur, dan personalisasi dari sebuah institusi dalam melayani misi khusus dari pendidikan tinggi secara menyeluruh (Mitrano, 2003).

Peran istimewa kebijakan teknologi informasi

Kebijakan teknologi informasi telah dianggap memainkan peran utama dalam keseluruhan pengembangan kebijakan pada semua universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik dan akademi. Semua pihak perlu mengetahui aturan penggunaan yang tepat, efisiensi yang maksimum, dan sekuriti yang tinggi dari sumber daya teknologi informasi baru yang dimiliki. Tetapi karena sumber daya ini relatif baru, maka dalam potensi untuk perubahan riset, pengajaran dan administrasi sangat bergantung pada persepsi setiap individu (Mitrano, 2003).

Institusi harus menghindari membuat kebijakan baru teknologi informasi, kapan dan di mana, akan lebih bijaksana untuk memfokuskan upaya penerapan kebijakan teknologi informasi yang telah ada tapi belum optimal dilaksanakan. Dengan demikian pembaruan kebijakan dapat menjadi alternatif solusi yang lebih baik.

Pengembangan dan manajemen kebijakan

Sebuah apresiasi dari kebijakan memerlukan pemahaman sekurang-kurangnya pada garis besar proses kebijakan tersebut. Tiga model pengembangan dan manajemen kebijakan pendidikan tinggi yang telah ada yaitu: (1) model pengembangan kebijakan terpusat, (2) model

desentralisasi, dan (3) model hibrid. Kebanyakan institusi pendidikan tinggi di Indonesia saat ini menggunakan model hibrid, yang mana beberapa aspek pengembangan kebijakan adalah terpusat dan lainnya tidak (Mitrano, 2003).

Harus disadari, bahwa teknologi informasi memainkan peran pada pendidikan tinggi untuk membuat model yang tepat untuk pengembangan dan manajemen kebijakan yang paling sesuai. Karenanya, professional-profesional teknologi informasi, lebih khususnya penasehat kebijakan teknologi informasi sebuah perguruan tinggi harus mempertimbangkan kekuatan administratif, yang pasti mempunyai dampak tidak hanya pada prinsip-prinsip kebijakan tetapi juga pada proses, formula dan sosialisasinya. Sebagai tambahan, untuk menjalankan pengembangan kebijakan secara umum, penasehat kebijakan harus menimbang aplikasi kebijakan khusus pada organisasi pusat atau untuk seluruh jaringan terdistribusi. Ukuran institusi, arsitektur dan kultur adalah isu-isu yang terpisah yang akan muncul bersama-sama yang harus dipertimbangkan dalam pengembangan dan manajemen kebijakan suatu perguruan tinggi.

Kebijakan Teknologi Informasi

Kebijakan teknologi informasi yang dapat diterima untuk diterapkan pada tahun 1980-an dan awal tahun 1990-a adalah secara umum mencakup penggunaan komputer dan sistem jaringan, dan sering dianggap sebagai dasar kebijakan teknologi informasi yang pertama yang komprehensif. Banyak isu yang saat itu lebih cenderung diperhatikan dalam kebijakan yang berbeda, untuk contoh: pada sekuriti tak ada “*sharing of passwords*”, pada privasi, universitas tidak memonitor komunikasi elektronik sebagai suatu praktek rutin (Mitrano, 2003).

Arti penting pertama kebijakan teknologi informasi generasi pertama ini pada lanskap yang kompleks pada perguruan tinggi adalah sebagai inisiatif pengembangan kebijakan. Hubungan simbiosis antara pengembangan kebijakan secara umum dan kebijakan teknologi informasi secara khususnya, adalah sangat penting untuk dicatat. Kedua, pengalaman di banyak hal adalah ibu dari setiap penemuan baru. Profesional teknologi informasi telah mengidentifikasikan bahwa institusi akan memiliki keuntungan ketika misalnya ada “*sharing passwords*”. *Sharing* ide-ide bagus, praktek-praktek terbaik, dan komunikasi untuk pengembangan baru adalah sangat penting.

Di beberapa tahun terakhir, banyak perguruan tinggi telah memulai mengembangkan sejumlah kebijakan teknologi informasi tambahan, yang meliputi area seperti: pesan masal, nama domain, privasi, akses dan dan penggunaan data, dan keamanan. Trend ini adalah untuk mengembangkan kebijakan terpisah di area ini. Banyak kampus memperbaharui kebijakan umum untuk menghadapi perubahan teknologi yang sangat cepat.

Kebijakan sekuriti teknologi informasi

Pada suatu waktu yang tidak tentu dan berhahaya, tak ada kebijakan teknologi informasi yang lebih penting dari sekuriti. Terkait pluralisme kultur kampus, ada begitu banyak pendapat terkait kebijakan sekuriti yang solid. Bagaimanapun, profesional teknologi informasi dan penasehat kebijakan dan teknisi harus mempunyai konsensus, misal terkait registrasi dan autentifikasi jaringan, karena jika tidak aka ada penanganan sekuriti yang komprehensif (Caruso, 2003).

Aksi pertama yang direkomendasikan terkait sekuriti teknologi informasi adalah pengembangan substansi, kebijakan sekuriti yang kokoh dan harus disegerakan. Hal ini tidak sesederhana pengucapannya dan akan membantu untuk mempunyai dukungan dari level tertinggi institusi. Karenanya, obligasi ini harus dimulai dari top hirarki, dengan kepala-kepala adminstratif diperlukan untuk pengawasan inventori sumber daya teknologi informasi.

Trend dan praktek pendidikan virtual

Isu utama terkait pendidikan virtual adalah pentingnya komunikasi antara dosen dan mahasiswa. Isu lainnya adalah menyangkut gaya pembelajaran, perbandingan dan kontrasnya hasil instruksi berbasis pengajaran di kelas dan pengajaran berbasis web, evaluasi pada sistem pembelajaran online, dampak umum dan tantangan pendidikan jarak jauh (virtual), implementasi pendidikan online dan jarak jauh. Kolaborasi antar sesama mahasiswa, evaluasi

kuantitatif dan kualitatif, dan penggunaan teknologi digital adalah isu lain dari pendidikan virtual yang memerlukan perhatian.

Meskipun internet saat ini dipuji sebagai infrastruktur yang akan memperluas akses pendidikan pada semua tipe dan jenjang pendidikan menuju konstituen global. Berikut adalah enam trend yang telah berhasil diidentifikasi:

a. Pengembangan fasilitas berbasis komuniti untuk memungkinkan pengaksesan peralatan teknologi informasi, konektifitas, dan sumber daya pendidikan
b. Cara baru untuk mengembangkan dan menyimpan isi sebagai “objek pembelajaran”
c. Sebuah perhatian tentang bagaimana kualitas dapat dipastikan mencukupi untuk lingkungan pendidikan virtual
d. Pengembangan model pengorganisasian baru untuk memfasilitasi proses pendidikan virtual
e. Penyedian layanan pendukung pembelajaran menggunakan teknologi informasi
f. Evaluasi yang berkelanjutan pada penggunaan teknologi informasi

Bagaimanapun, teknologi informasi tidak dapat menggantikan faktor manusia pada aktifitas pengajaran di perguruan tinggi. Teknologi informasi tidaklah sedekat dan sepenting faktor lainnya, seperti tugas-tugas pembelajaran, karakteristik dosen, dan motivasi mahasiswa. Pedagogik bagaimanapun adalah “seni pengajaran” yang sangat penting (Merisotis and Phipps, 1999).

Meskipun demikian, masih banyak praktisi percaya bahwa pendidikan virtual menawarkan pendidikan yang lebih interaktif yang mengajak berpikir kritis, dan fleksibilitas dari mahasiswa dan dosen dibandingkan dengan pendidikan tradisional di depan kelas (Farrell, 2001). Bagaimanapun, Martin (1997) dalam penelitiannya mengatakan bahwa pendidikan virtual adalah infrastruktur yang tidak mencukupi untuk model pembelajaran di perguruan tinggi.

Simpulan

Teknologi informasi memainkan peran penting pada pengembangan kebijakan pendidikan tinggi yang mengatur kompromi dalam konteks riset, pengajaran dan layanan misi. Pengenalan perbedaan antara kebijakan teknologi informasi yang ada dan area baru untuk pengembangan kebijakan teknologi informasi khusus menjadi prioritas utama dari analisis kebijakan. Bagaimanapun, penjaminan bahwa suatu kebijakan khusus yang memperhatikan tradisi institusi dan sifat personal dan fleksibilitas pelaksanaannya juga harus diperhatikan. Namun demikian, teknologi informasi tidak akan bisa menggantikan faktor manusia pada aktifitas pedagogik berbasis kelas.

Referensi:

Caruso JB., 2003, Information technology security policy: key to success, EDUCAUSE: center for applied research, Vol.2003, Issues.23, Colorado.

Farrell G., 2001, The changing faces of virtual education, The commonwealth of learning, Vancouver: British Columbia.

Martin R., 1997, Key issues in transitioning from distance education to distributed learning. Available on: http://www.fcae.nova.edu/disted/spring98/martin.html

McClure PA., 1998, Why policy matters, CAUSE/EFFECT, Fall 1998, pp.3-6.

Merisotis J, and Phipps S., What’s the deference?, Change, Vol.31, No.2, pp.12-17, 1999.

Mitrano T., 2003, Resolving information technology policy issues on the networked campus, Book Chapter, editor: McClure, PA., Jossey-Bass: A Wiley Company, New York.